

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Dasar Hukum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris yang secara teknis operasional dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan pelayanan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD;
- g. Pengelolaan Tata Usaha Sekretariat DPRD;
- h. Penginventarisasian permasalahan dalam pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan alternatif penyelesaian masalahnya;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD kepada Bupati;

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setwan.

3. Aspek Strategis Organisasi

Paradigma baru Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud, membawa konsekuensi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kinerjanya secara optimal.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu lembaga Pemerintah Daerah selalu berusaha meningkatkan kinerjanya secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Banjarnegara secara optimal.

Dengan kondisi jadwal kerja DPRD yang padat dan tuntutan dari anggota DPRD untuk selalu segera terfasilitasi segala kebutuhan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menyebabkan ada beberapa tugas pokok Sekretariat DPRD yang pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah karyawan, selain itu juga DPRD belum seluruh anggotanya mampu mengoperasikan dan mempunyai fasilitas yang mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menerapkan TNDE.

4. Struktur Organisasi

a. Komposisi Personalia

Komposisi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sampai saat ini terdiri atas :

- 1) PNS = 45 orang
- 2) CPNS = - orang

3) PTT = 2 orang

Sedangkan berdasarkan strata / penjurangan pendidikan formal yang dimilikinya, komposisi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sampai dengan saat sekarang yaitu :

- 1) PNS berpendidikan S2 = 2 orang
- 2) PNS berpendidikan S1 = 14 orang
- 3) PNS berpendidikan D.II/D.III/Sederajat = 1 orang
- 4) PNS berpendidikan SLTA / Sederajat = 27 orang
- 5) PNS berpendidikan SLTP / Sederajat = 1 orang
- 6) PNS berpendidikan SD / Sederajat = - orang

Dengan mengacu kepada keadaan sekarang, keberadaan PNS dan non-PNS di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dirasa kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Untuk itu kami telah mengajukan permohonan penambahan SDM baik PNS maupun Non PNS. Selain itu juga dalam menghadapi era globalisasi ini dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui diklat penjurangan maupun non formal.

5. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

- 1) Sekretaris DPRD, eselon II.b = 1 orang
- 2) Kepala Bagian, eselon III.a = 3 orang
- 3) Kepala Sub Bagian, eselon IV.a = 7 orang

Secara keseluruhan data pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
DATA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016

NO	Golongan / Ruang	Jenis kepegawaian		Jenjang Pendidikan					
		CPNS	PNS	SD	SLTP	SLTA	D.III	S1	S2
1	I.a	-	-	-	-	-	-	-	-
2	I.b	-	1	1	-	-	-	-	-
3	I.c	-	1	-	1	-	-	-	-
4	I.d	-	-	-	-	-	-	-	-
5	II.a	-	2	1	-	1	-	-	-
6	II.b	-	20	-	-	20	-	-	-
7	II.c	-	4	-	-	4	-	-	-
8	II.d	-	-	-	-	-	1	-	-
9	III.a	-	2	-	-	-	-	-	-
10	III.b	-	4	-	-	2	1	-	-
11	III.c	-	2	-	-	-	-	2	-
12	III.d	-	7	-	-	-	1	6	-
13	IV.a	-	-	-	-	-	-	-	-
14	IV.b	-	3	-	-	-	-	2	1
15	IV.c	-	1	-	-	-	-	-	1
16	IV.d	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	45	2	1	27	3	10	2

Tabel 2
DATA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	2	
2	S1	14	
3	D.III	1	
4	SLTA	27	
5	SLTP	1	
6	SD	-	
Jumlah		45	

Tabel 3
DATA PEGAWAI TIDAK TETAP SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	-	-
2	S1	-	-
3	D.III	-	-
4	SLTA	14	-
5	SLTP	3	-
6	SD	-	-
Jumlah		17	-

B. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD disusun berdasar atas keterpaduan sasaran yang harus yaitu meningkatkan pelayanan kepada DPRD dengan target dan indikator yang harus dicapai dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil capaian kinerja dan permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya isu-isu strategis digunakan sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program untuk lima tahun ke depan melalui perencanaan strategis, menganalisis hambatan dan langka-langkah antisipatif dan korektif yang ditempuh.

1. Rencana Strategis

- a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan bagi DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
- d. Meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran

1. Potensi sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif masih rendah
2. Perencanaan kegiatan masih terfokus pada tahun-tahun yang sebelumnya dan masih ragu dalam melakukan inovasi kegiatan
3. Masih adanya beberapa program dan kegiatan yang belum mencerminkan kualitas kegiatan yang efektif, tepat sasaran dan tepat guna dan tepat manfaat.
4. Pelaksanaan tupoksi belum maksimal dan kerjasama antara tim pengelola anggaran belum berjalan sesuai harapan .

3. Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka mensiasati kekurangan keberhasilan pencapaian sasaran antara lain

- a. Mengusulkan penambahan staf ke- BKD Kab. Banjarnegara sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan serta mendukung karyawan/i untuk berpartisipasi dalam bimtek peningkatan kapasitas SDM.

- b. Perencanaan kegiatan perlu lebih dimatangkan dan koordinasi antar tim pengelola anggaran lebih ditingkatkan.
- c. Perlunya efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai program.
- d. Kesadaran , tanggung jawab, dan kerjasama karyawan/i di lingkungan Setwan perlu ditingkatkan melalui pembinaan (*staf meeting*) secara berkala.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Seiring telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur politik hukum dan ekonomi pada tingkat Daerah, Nasional dan Global, menjadikan kebijakan desentralisasi, proses demokratisasi, privatisasi dan globalisasi telah mewarnai dinamika penyelenggaraan pemerintah di daerah. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan tugas-tugas pokok DPRD dibutuhkan kerjasama global antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat.

Dasar pemikiran inilah yang mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerja melalui Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara agar berjalan beriringan dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi yang besangkutan didalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2016 yaitu **“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA KEPADA DPRD UNTUK MENGHANTARKAN BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA “**.

Untuk mewujudkan visi dimaksud diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai misi :

- a. Peningkatan tertib administrasi;
- b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja;
- c. Peningkatan kualitas SDM;

d. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan kegiatan DPRD.

Dalam melaksanakan beberapa misinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu tahun 2016 baru melaksanakan 1 sasaran strategis yaitu meningkatkan pelayanan kepada DPRD dengan total jumlah anggaran Rp. 18.133.262.400, Untuk Mencapai sasaran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara menjabarkannya lebih lanjut kedalam 6 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7. Program Pembinaan, Peningkatan Kualitas Organisasi Kemasyarakatan

Keenam program tersebut dicapai melalui 22 kegiatan sebagaimana berikut :

1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	116.900.000
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp.	37.550.000
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	21.899.900
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp.	3.639.931.000
5	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor	Rp.	219.486.000
6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.	18.000.000
7	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.	438.422.000
8	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Rp.	10.000.000
9	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp.	191.000.000
10	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Rp.	625.000.000
11	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Rp.	85.675.000
12	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp.	280.589.500
13	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Rp.	21.705.000

14	Pembahasan rancangan peraturan daerah (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	Rp.	783.465.000
15	Kegiatan Reses	Rp.	1.824.030.000
16	Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	Rp.	6.447.350.000
17	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Rp.	2.795.475.000
18	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	Rp.	18.550.000
19	Pembuatan majalah komunikatif DPRD	Rp.	197.938.000
20	Pembuatan himpunan produk-produk DPRD	Rp.	30.476.000
21	Pemeliharaan software/program/sistem informasi	Rp.	49.820.000
22	Penyebarluasan informasi layanan publik	Rp.	280.000.000
	Jumlah	Rp.	18.133.262.400

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Tahun Anggaran 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan yang dicapai, selanjutnya diukur dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa sasaran telah dapat dicapai dengan baik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
HASIL CAPAIAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa dan perlengkapan kantor	100% (5 unit gedung)	100% (5 unit gedung)	100%
	Jumlah pengelola keuangan yang terpenuhi jasa administrasi keuangan	9 orang	9 orang	100%
	Prosentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	100% (25 unit)	100% (25 unit)	100%
	Prosentase pemenuhan bahan logistik kantor	100% (15 paket)	100% (15 paket)	100%
	Jumlah tenaga pendukung operasional yang terpenuhi jasa administrasinya	12 orang	12 orang	100%

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	2 paket	2 paket	100%
Jumlah Peralatan gedung kantor yang memadai	15 unit	15 unit	100%
Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100%
Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100%
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	31 unit	31 unit	100%
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 unit	12 unit	100%
Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk anggota DPRD	180 stel/set	180 stel/set	100%
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	100%
Jumlah Raperda Inisiatif DPRD yang tersusun	6 raperda	5 raperda	83%
Jumlah Raperda yang dibahas	21 Raperda dan 6 Raperda Inisiatif	21 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	90%
Jumlah Perda yang ditetapkan	21 perda dan 6 perda inisiatif	21 perda dan 5 perda inisiatif	90%
Jumlah aspirasi masyarakat yang terserap	45 paket / 2 tahap	45 paket / 2 tahap	100%
Jumlah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas DPRD	50 orang	50 orang	100%
Jumlah tambahan buku referensi untuk legislatif dan eksekutif	14 buku	14 buku	100%
Jumlah majalah komunikatif yang tercetak	4 edisi	4 edisi	100%
Jumlah himpunan produk-	1 buku (130 eks)	1 buku (130 eks)	100%

	produk DPRD yang di cetak			
	Jumlah software/ program/ Sistem informasi yang terpelihara	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah kegiatan sosialisasi kinerja DPRD	2 paket	2 paket	100%

Dilihat dari tabel indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 sebagian besar tercapai 100%. Capaian kinerja yang belum mencapai 100% yaitu kegiatan penyusunan raperda pada program peningkatan kapasitas anggota DPRD yang baru mencapai 90% hal ini dikarenakan ada satu raperda inisiatif yang seharusnya dibahas dan ditetapkan di tahun 2016 tetapi karena penetapan jadwal pembahasan perda dilakukan bukan pada awal tahun sehingga kelengkapan perda berupa naskah akademik belum dapat dipenuhi tepat waktu, akhirnya satu raperda yaitu Sistem Pengawasan Pembangunan belum dapat dibahas.

Sesuai dengan program pembentukan perda (propemperda) tahun 2016, perda yang seharusnya ditetapkan sejumlah 28 perda, 5 diantaranya berasal dari raperda inisiatif DPRD. Namun pada akhir tahun 2016 hanya 21 perda yang ditetapkan dan dibahas yang 5 diantaranya raperda inisiatif. 5 Raperda Inisiatif DPRD yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Petani
2. Kelembagaan Masyarakat Desa
3. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
4. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Penyelenggaraan Jamaah Haji

Kinerja yang telah mencapai 100% tidak lain karena kerjasama berbagai pihak selain itu diantaranya :

1. *jobs description* yang baik disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing karyawan/karyawati Sekretariat DPRD.
2. Pelaksanaan studi komparasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja baik DPRD maupun sekretariat DPRD.

3. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan analisis dalam evaluasi manajemen sehingga tetap pada alur program yang sudah direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa dan perlengkapan kantor	100% (5 unit gedung)	100% (5 unit gedung)	100% (5 unit gedung)	100% (5 unit gedung)	100% (5 unit gedung)
Jumlah pengelola keuangan yang terpenuhi jasa administrasi keuangan	7 orang	7 orang	8 orang	9 orang	9 orang
Prosentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	100% (20 unit)	100% (20 unit)	100% (25 unit)	100% (25 unit)	100% (25 unit)
Prosentase pemenuhan bahan logistik kantor	100% (15 paket)	100% (15 paket)	100% (15 paket)	100% (15 paket)	100% (15 paket)
Jumlah tenaga pendukung operasional yang terpenuhi jasa administrasinya	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
Jumlah Peralatan gedung kantor yang memadai	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit
Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100% (1 unit)
Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100% (1 unit)
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit
Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk anggota DPRD	180 stel/set	180 stel/set	180 stel/set	180 stel/set	180 stel/set
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen

SKPD yang tersusun					
Jumlah Raperda Inisiatif DPRD yang tersusun	5 raperda	5 raperda	5 raperda	5 raperda	6 raperda
Jumlah Raperda yang dibahas	18 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	24 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	21 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	17 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	21 Raperda
Jumlah Perda yang ditetapkan	18 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	24 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	21 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	17 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	58 Keputusan Raperda
Jumlah aspirasi masyarakat yang terserap	45 paket / 2 tahap	45 paket / 2 tahap	45 paket / 2 tahap	45 paket / 2 tahap	45 paket / 2 tahap
Jumlah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas DPRD	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
Jumlah tambahan buku referensi untuk legislatif dan eksekutif	14 buku	14 buku	14 buku	14 buku	14 buku
Jumlah majalah komunikatif yang tercetak	4 edisi	4 edisi	4 edisi	4 edisi	4 edisi
Jumlah himpunan produk-produk DPRD yang di cetak	1 buku (130 eks)	1 buku (130 eks)	1 buku (130 eks)	1 buku (130 eks)	1 buku (130 eks)
Jumlah software/ program/ Sistem informasi yang terpelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Jumlah kegiatan sosialisasi kinerja DPRD	-	-	-	-	2 paket

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan- peturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan realisasi anggaran. Perlu kami jelaskan bahwa dalam rangka membiayai operasional Sekretariat DPRD Kab. Banjarnegara pada tahun 2016 mendapat anggaran sebesar Rp. 13.346.319.900. Melalui APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp. 18.133.262.400 atau kenaikan sebesar 35,86 %. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 13.533.946.773 atau sebesar 88 % dengan rincian sebagai berikut.

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1.	Meningkat nya pelayanan kepada DPRD	Pelayanan administrasi perkantoran	4.035.766.900	2.460.003.449	61
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.368.097.000	1.321.582.750	98
		Peningkatan disiplin Aparatur	280.589.500	239.601.450	85
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.705.000	17.716.500	82
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	12.097.284.000	9.186.435.124	76
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	49.820.000	38.300.000	77
		Program	280.000.000	270.307.500	97

		Pembinaan, Peningkatan Kualitas Organisasi Ke- masyarakatan			
JUMLAH			18.133.262.400	13.533.946.773	88

Realisasi keuangan untuk tahun 2016 hanya 88 %, hal itu disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran hanya terealisasi 61%, hal ini dikarenakan antara lain :
 - a. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor khususnya pada anggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka mendampingi kunjungan kerja DPRD oleh Sekretariat tidak terserap diantaranya pada kegiatan sebagai berikut :
 - Kunjungan pimpinan DPRD ke luar Jawa sebanyak 2 kali kunjungan tidak terlaksana.
 - Kunjungan pimpinan dan komisi I-IV sebanyak 1 kali tidak terlaksana
 - Kunjungan pimpinan dan anggota dalam rangka konsultasi berkaitan dengan program kerja DPRD yang seharusnya 11 kali hanya dapat dilaksanakan 6 kali.
 - b. Kegiatan penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), jasa (tenaga pendukung operasional kantor) untuk belanja pegawai yaitu Honor 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL) selama setahun tidak diealisasikan karena perencanaan untuk 16 orang THL kenyataannya hanya 14 orang THL yang bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD.
 - c. Efisiensi di dalam pembelian peralatan dan perlengkapan kantor.
2. Realisasi anggaran pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah terserap 76 % dikarenakan

- a. Terdapat agenda pimpinan dan anggota DPRD kunjungan dalam dan luar daerah tidak dilaksanakan diantaranya kunjungan/ studi banding sebagai berikut :
 - Kunjungan pimpinan DPRD ke luar Jawa sebanyak 2 kali kunjungan tidak terlaksana.
 - Kunjungan pimpinan dan komisi I-IV sebanyak 1 kali tidak terlaksana
 - Kunjungan pimpinan dan anggota dalam rangka konsultasi berkaitan dengan program kerja DPRD yang seharusnya 11 kali hanya dapat dilaksanakan 6 kali.
 - b. Pelaksanaan reses anggota DPRD, bahwasanya tidak semua anggota DPRD melaksanakan reses sehingga anggaran reses tidak terserap maksimal. Pada reses tahap I , 2 orang tidak melaksanakan reses, pada tahap II ada 3 orang yang tidak melaksanakan reses.
3. Pada program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada kegiatan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi pada program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tidak dilaksanakan karena penjadwalan terkait kunjungan tersebut kurang terencana dengan baik.
 4. Honor narasumber kegiatan saba desa pada Pogram Informasi Layanan Publik tidak terambil karena ada beberapa narasumber tidak hadir sehingga honor tidak terambil. Selain itu, penyusunan indeks anggaran perjalanan dinas dalam daerah yang tertuang pada Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) lebih tinggi dibanding standarisasi yang telah ditetapkan.
 5. Penganggaran terhadap kegiatan pembahasan perda yang seharusnya 6 raperda hanya dapat membahas 5 raperda di tahun 2016, sehingga anggaran pada kegiatan pembahasan satu raperda tidak terserap. Adapun 5 Raperda Inisiatif DPRD yang telah dibahas adalah sebagai berikut :
 - ✓ Pemberdayaan dan Perlindungan Petani
 - ✓ Kelembagaan Masyarakat Desa
 - ✓ Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 - ✓ Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
 - ✓ Penyelenggaraan Jamaah Haji

BAB IV

PENUTUP

Secara umum capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah tercapai dengan melihat dari 2 indikator kinerja terdiri dari 7 (tujuh) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi keuangan hanya mencapai 88%. Berhasilnya kinerja beberapa kegiatan antara lain disebabkan, hal-hal sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia yang baik, dalam rangka upaya mengoptimalkan personil dalam perencanaan, koordinasi, konsultasi dengan dinas instansi (stake holder) terkait
2. Pengukuran Kinerja dijadikan pedoman dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja dan keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang tidak memberi peluang untuk merubah konsep dan implementasi perencanaan baik perubahan terhadap program dan besaran anggaran.
3. Perencanaan program dan penyerapan anggaran disusun secara sistematis melalui rencana kerja operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.
4. Monitoring dan evaluasi sebagai wahana kontrol dan pengendalian program mulai dari poses perencanaan sampai outcome yang diharapkan telah dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan sekretariat DPRD untuk mencapai sasaran yang diharapkan yaitu peningkatan mutu pelaksanaan program antara lain dengan :

1. Pengukuran kinerja perlu disusun melalui kajian terhadap analisis terhadap sasaran yang akan dicapai, potensi yang dimiliki dan hambatan yang ditemukan.
2. Dokumen-dokumen perencanaan sebagai alat pengendali dalam rangka mencapai akuntabilitas publik dengan memberi kepastian pada aspek-aspek penting perencanaan dan pelaksanaan program.
3. Monitoring dan evaluasi secara internal yang telah dilakukan secara kontinyu setiap bulan ataupun triwulan, sebagai tolok ukur dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu program.

4. Menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik antara lembaga DPRD dan sekretariat DPRD.
5. Menjalin komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan stok holder terkait

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016, tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 tak lepas dari peran para pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan laporan ini sehingga dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Dan kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang telah mencermati LKjIP ini, guna bahan penyempurnaan pelaksanaannya dimasa mendatang

Banjarnegara, Maret 2017

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO, ST,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198601 1 003